

**TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT OLEH PEMDA PRINGSEWU
(Studi Pada Objek Wisata *Rest Area* Wates Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S.sos Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh

**Agustina Pudji Rahayu
NPM: 1531040136**

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020**

**TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT OLEH PEMDA PRINGSEWU
(Studi Pada Objek Wisata *Rest Area* Wates Gading Rejo,
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S.sos Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

**Agustina Pudji Rahayu
NPM: 1531040136**

Jurusan Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.
Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.si.

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020**

ABSTRAK

TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMDA PRINGSEWU (Studi Pada Objek Wisata *Rest Area* Wates Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh
Agustina Pudji Rahayu

Objek wisata tugu bambu pringsewu merupakan sebuah ikon atau *landmark* dari Kabupaten Pringsewu yang terletak pada Kelurahan Wates, Kecamatan Gading Rejo. Selain sebagai objek wisata, tugu bambu pringsewu pula memiliki banyak manfaat di dalamnya seperti banyaknya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, terdapat juga lokasi area perdagangan yang luas yaitu hampir setengah dari lokasi keseluruhan tugu bambu pringsewu. Tujuan utama dari dibangunnya area perdagangan tersebut yaitu selain memberikan tempat beristirahat yang nyaman bagi para pengunjung yang hadir ke area tersebut, pemerintah daerah juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk dapat berjualan pada lokasi tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya, Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang hubungan Politik Pemerintah Daerah Pringsewu terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di *rest area* Tugu Bambu desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dan upaya Pemerintah Daerah Pringsewu dalam peningkatan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus yang bersifat deskriptif, dimana data didapatkan dari hasil wawancara yang melibatkan pemerintah daerah, pedagang, dan pengunjung. Observasi dan dokumentasi pula dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan yang kemudian dilakukan analisis. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan hubungan politik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan dibangunnya area perdagangan, area fasilitas umum, dan terciptanya kondisi tertib dan aman, serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan keberhasilan pemerintah daerah yaitu dengan penghapusan uang sewa, mengintensifkan promosi, dan pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat bagi para pedagang, upaya tersebut dapat dikatakan berhasil dikarenakan adanya peningkatan jumlah pedagang dari setiap tahunnya serta kepuasan dari para pedagang yang dapat memenuhi kebutuhan dari hasil dagangannya.

Kata Kunci : Politik, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustina Pudji Rahayu
NPM : 1531040136
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Pringsewu (Studi Pada Objek Wisata *rest area* Gading Rejo Kabupaten Pringsewu) merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat ataupun mengambil dari orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
008FAHF727463933
6000
DALUWANG
Agustina Pudji Rahayu



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: JL. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH
DAERAH PRINGSEWU (Studi pada obyek wisata Rest Area
Wates Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Agustina Pudji Rahayu
NPM : 1531040136
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 197503172003121003

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU** (Studi Pada Obyek Wisata Rest Area Gading Rejo Kabupaten Pringsewu). Disusun oleh **AGUSTINA PUDJI RAHAYU**. NPM : **1531040136**. Prodi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**. Fakultas : **USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**, telah dimunaqosyahkan pada hari/tanggal : **Senin, 19 Oktober 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Idrus Ruslan, M.A

Sekretaris Sidang : Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si

Penguji Utama : Abd. Qohar, M.Si

Penguji I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Penguji II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

DEKAN

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP.196003131989031004

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

(QS. Al-An'am: 165)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Kepada Ayah-ku Wiegnyo Suharno yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan anak – anaknya, yang tak kenal lelah dalam mencari rezeki untuk dapat membahagiakan keluarga. Kepada Ibu-ku Tri Sulasmini yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan tak henti memanjatkan doa demi kesuksesan anak – anaknya. Terima kasih ayah dan ibu atas dukungan, tetes air mata, dan keringat yang mengalir untuk anaknya yang selalu membebani ini. berkat kalian sehingga anakmu dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kepada Cahya Adi Masta, S.T tercinta yang selalu memberi semangat, nasihat dan juga banyak meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran dalam penyelesaian skripsi.
3. Kepada adik-adik ku tersayang Sumarina Pudji Lestari, Mutiara Efinta, Idza Mahendra, dan Aditya yang telah memberikan doa serta dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi.
4. Kepada dosen pembimbing I Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si. Serta pembimbing II Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.

5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menuntut ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga yang tidak bisa penulis lupakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Agustina Pudji Rahayu, merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 1997. Dari pasangan Bapak Wiegnyo Suharno dan Ibu Tri Sulasmini.

Pendidikan formal penulis dimulai dari sekolah dasar SD Kartika II-6 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan mengambil jurusan Pemikiran Politik Islam di mulai pada TA. 2015/2020.

Demikian riwayat hidup penulis yang pernah penulis jalani selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020

Penulis

Agustina Pudji Rahayu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah tercurahkan karunia nya bagi seluruh umat manusia di dunia, tak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Peserta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai akhir tiba.

Berkat rahmat, inayah dan nikmat kemudahan yang Allah SWT berikan, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini berupa skripsi, yaitu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam jurusan pemikiran politik islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul: **“Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Pringsewu (Studi Pada Objek Wisata *Rest Area* Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)”**.

Penulis menyadari bahwa karya ini bukan hanya karya pribadi penulis, tetapi sebagian merupakan buah dari pemikiran dan pemberian ide dari orang-orang yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang banyak membantu, berjasa dan terhormat kepada:

1. Bapak Prof. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.si selaku ketua jurusan Pemikiran Poltik Islam.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si serta Bapak Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran serta ketelitiannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Pemikiran Politik Islam serta seluruh pengajar di Fakultas Ushuluddin dan studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama Tholabul Ilmi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Kepala UPT perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
7. Untuk sahabatku sedari awal perkuliahan Diah Intan Pertiwi, serta para sahabatku (Ratu Suci Ramdayanah, Dira Ariani Putri, Rita Ayudita), serta sahabatku sedari kecil (Khairunnisa Savira Ruslina dan Tika Tiara). Terimakasih atas canda dan tawa selama penulis duduk di bangku perkuliahan, serta saling memotivasi dan saling menyemangati satu sama lain.
8. Teman-teman seperjuanganku jurusan pemikiran politik islam Angkatan 2015. Khususnya kelas PPI C terimakasih atas segala warna yang telah kalian berikan.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020

Penulis

Agustina Pudji Rahayu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Signifikansi Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian	13

BAB II POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Politik.....	20
1. Pengertian Politik dan Partai Politik.....	20
2. Peran Politik dalam Mensejahterakan Masyarakat.....	21
B. Pemerintah Daerah	22

1.	Pengertian Pemerintah Daerah	22
2.	Fungsi Pemerintah Daerah.....	23
3.	Kebijakan Otonomi Daerah.....	25
4.	Pembangunan Ekonomi.....	26
C.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	31
1.	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	31
2.	Konsep Pemberdayaan ekonomi masyarakat	34
D.	Upaya Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	37

BAB III MENGENAL PROFIL *REST AREA* TUGU BAMBURU DAN RUANG LINGKUP *REST AREA* TUGU BAMBURU PRINGSEWU

A.	Gambaran Umum <i>Rest Area</i> Tugu Bambu Pringsewu	Error! Bookmark not defined.
1.	Sejarah Singkat Perkembangan Masyarakat Pringsewu	Error! Bookmark not defined.
B.	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Politik.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.
C.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
1.	Upaya Pemerintah Daerah Pringsewu dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di <i>Rest Area</i> Tugu Bambu.	Error! Bookmark not defined.

BAB IV TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMDA PRINGSEWU

A.	Hubungan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di <i>Rest Area</i> Tugu Bambu Pringsewu	Error! Bookmark not defined.
1.	Penyedia Fasilitas Area Perdagangan....	Error! Bookmark not defined.
2.	Penyedia Fasilitas Umum Bagi Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
3.	Menciptakan Kondisi Tertib dan Aman	Error! Bookmark not defined.

- B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam mencapai tingkat keberhasilan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di *Rest Area* Tugu Bambu Pringsewu.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Menghapus Biaya Sewa.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Mengintensifkan Promosi.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pembinaan Pengembangan Ekonomi Mandiri **Error! Bookmark not defined.**
- C. Pengaruh Adanya *Rest Area* Tugu Bambu Bagi Masyarakat Atau Pengunjung**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Tempat Berkumpul dan Bersantai**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Tempat Wisata dan Mencari Informasi**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Rekomendasi**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 41

LAMPIRAN..... 45

BAB I

TINGKAT KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU

(studi pada objek wisata *rest area* Wates Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka perlu kiranya judul ini perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah. Adapun judul yang digunakan penulis adalah **“Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Pringsewu”**.

Tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Ginanjar Kartasasmita adalah suatu tingkat keberhasilan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi dengan cara meningkatkan perekonomian lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, untuk pencapaian membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹

Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PEMDA Pringsewu, melalui *rest area* Tugu Bambu, PEMDA memberikan peluang tempat bagi usaha

¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cideseno, 1996), h. 145

masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki pendapatan. Pendapatan yang di dapat oleh masyarakat setiap harinya di dapatkan dengan cara berdagang di *rest area* Tugu bambu. Setiap harinya di *rest area* Tugu Bambu bisa mencapai kurang lebih 30 orang pengunjung di hari biasa, dan pengunjung bisa meningkat kedatangannya pada saat hari libur, seperti hari sabtu dan minggu bisa mencapai kurang lebih 50 orang pengunjung yang biasa melewati lintas Barat, sehingga PEMDA menyediakan lahan untuk masyarakat berdagang dan memenuhi segala fasilitas di dalam *rest area* tugu bambu guna mendukung upaya-upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan kesenjangan yang ada.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.²

Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang akan terdapat di dalam judul, peneliti memaksudkan bahwa tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PEMDA Pringsewu (studi pada objek wisata Wates *rest area* Gading Rejo Kabupaten Pringsewu) adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu seperti perubahan daya

² Mardiyatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, dalam Naskah No. 20 Juni-Juli 2000, h. 3

ekonomi masyarakat Pringsewu di *rest area* dalam pembangunan ekonomi merujuk kepada kenaikan di dalam pendapatan nasional atau perkapita dan output. Di dalam pembangunan ekonomi pendapatan perkapita masyarakat yang naik dan juga terjadi perubahan asas struktur ekonomi.³

B. Alasan Memilih Judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini dikarenakan adanya sebuah masalah sehingga peneliti tergerak untuk melakukan penelitian. Adapun alasan peneliti dalam memilih judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Memastikan kinerja Pemerintah Daerah Pringsewu dalam mengemban amanat rakyat dengan melihat Pemberdayaan Ekonomi masyarakat di *rest area* Tugu Bambu Pringsewu.
- b. Mengetahui Kondisi Ekonomi Masyarakat Setelah Adanya *rest area* Tugu Bambu Pringsewu.

2. Alasan Subjektif

- a. Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti, yaitu Pemikiran Politik Islam.
- b. Data-data yang dibutuhkan tersedia baik berupa teori (buku-buku) atau data lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

³*Ibid.*

C. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan politik. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.⁴Ekonomi dan politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah Negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat, bila mereka berdiri sendiri niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata keuangan suatu negara. Sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan.⁵

⁴Skousen, M, *Teori-teori ekonomi modern*, (Prenadamedia : Jakarta , 2005), h. 95

⁵ Pramitha Sari Waluyo, "hubungan antara Ekonomi dan Politik" (Online), tersedia di : <https://www.diction.id/t/apa,-hubungan-politik-dengan-ekonomi/13397> (09 Desember 2019)

Dalam perekonomian pemerintah dapat membuat kebijakan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara melindungi hak milik dan menjaga kestabilan politik. Kestabilan politik adalah hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan kestabilan politik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sebuah institusi politik, di mana institusi politik akan menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi.⁶ Intstitusi bertugas untuk mengatur tentang hak milik seseorang atas barang dan jasa, mengatur dan mengendalikan redistribusi pendapatan secara merata serta sistem pemerintahan yang diterapkan pada sebuah negaranya yaitu Negara demokrasi.⁷ Ada 3 konsep yang menempatkan politik bisa menjadi erat kaitannya dengan ilmu ekonomi nanti pada akhirnya, seperti:

1. Politik sebagai pemerintahan

Di dalam konsep ini jelas bahwa politik diletakan sebagai lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang mengambil kebijakan yang strategis untuk sebuah wilayah yang mencakup tataran negara. Kajian ini pun berbicara masalah-masalah mengenai organisasi pemerintahan, pembagian kekuasaan dan peran pemerintah yang menjadi fokus utama yang melihat kondisi-kondisi relevansi yang ada menjadi satu kesatuan dalam perbincangan ekonomi politik termutakhir.

⁶ Abd. Qohar, *Politik dan Islam di Indonesia*, (Jurnal TAPIs Vol. 14 No.01 Januari–Juni 2017), h.46.

⁷ Pipit D, Septiani, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kestabilan Politik di Indonesia*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), h.58

Namun dalam konsep ini ada beberapa kelemahan yang terlihat seperti cakupan-cakupan pemerintahan yang dinilai terlalu sempit bila kita berbicara negara pada ranah kekuasaan, pengabaian perbincangan mengenai korelasi yang berhubungan antara swasta dan pemerintah, kepentingan pribadi yang dibawa personal atau kelompok dalam pemerintahan yang berpotensi melawan penyelewengan.

2. Pemerintah sebagai publik

Dalam fokus kajian ini kita diajak memasuki kawasan-kawasan yang sifatnya ekonomis sekali yaitu berupa sebuah peristiwa yang hadir tengah-tengah masyarakat seperti perdebatan antara apa yang disebut dengan urusan publik. Publik juga tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individual yang mempengaruhi kesejahteraan bahkan eksistensi masyarakat umum dalam hal ini adalah publik. Dalam pembahasan mengenai public dan privat kita mengenal istilah "*Public Good*", yang dimaksud *public good* adalah barang-barang maupun jasa yang dianggap berharga dan sifatnya sangat strategis bagi kebutuhan masyarakat. Bila kita berangkat dari pemikiran John Dewey, sektor publik adalah sebuah bentuk nyata tanggungan dan tanggung jawab dari negara. Menurut Dewey jelas sekali terlihat bahwa public adalah ranah dimana masyarakat mempunyai tidak terlepas dari kepentingan dan pilihan.

3. Politik sebagai alokasi nilai oleh pihak yang berwenang

Dalam kajian dalam bidang ini, aksentuasi ketat pada apa yang dimaksud distribusi nilai dalam masyarakat dengan kewenangan tertentu. Mengapa pendekatan ini dinilai relevan sebagai bentuk integrasi efektif antara politik dan ekonomi adalah karena keduanya adalah mengamini tentang metode alokasi. Bila dalam sudut pandang ekonomi mengenai kelangkaan maka tidak terlepas dari sektor produksi dan ini berkaitan erat dengan politik yang memiliki kewenangan hampir secara penuh untuk semisal distribusi sumberdaya alam, kecakapan teknis dalam hal kualitas alat-alat produksi dan lain-lain.

Sebuah Negara yang memiliki sistem peradilan yang baik, pegawai pemerintahan yang jujur dan perundang-undangan yang jelas dan kuat akan mengalami standard hidup perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara yang sistem peradilannya lemah, pemerintahnya korup dan sering terjadi revolusi atau kudeta.⁸

Otonomi daerah pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonomi yang mandiri.⁹ Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Itu berarti pemberian kewenangan otonomi secara luas kepada daerah melalui asas desentralisasi.

⁸ Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta, 2012), h.28

⁹Siti, Zuliyah, "StrategiPemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah", *Journal Of Rural And Development*, Vol. I, No. 2, (Agustus 2010), h. 151

Pelaksanaan desentralisasi kepada birokrasi pemerintah daerah, juga mencakup pelaksanaan desentralisasi kepada masyarakat yang di implementasikan melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Menurut Sumaryadi yang di kutip oleh Zaili Rusli, dkk menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka di dengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.¹¹ Konsep pemberdayaan ekonomi telah di coba di terapkan melalui pelaksanaan program nasional penanggulangan kemiskinan berdasarkan impress No.5 Tahun 1993 yang kemudian di kenal sebagai program IDT semua usaha di arahkan pada kemakmuran.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari pada makhluk-mahluk lainnya, dan dalam setiap kelompoknya manusia mempunyai seorang pemimpin untuk memimpin kesejahteraan dengan tujuan mencapai suatu keberhasilan, dan untuk

¹⁰Lasiman Sugiri, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, h.57

¹¹Zaili Rusli, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 2, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2012), h. 69

menjadi seorang pemimpin harus mempunyai sifat baik seperti adil dan amanah.¹²

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 58, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisaa': 58)*

Berdasarkan ayat diatas berisi mengenai tugas seorang pemimpin khususnya pemerintah daerah yang berperan penting dalam menjalankan tugasnya agar tujuan mensejahterakan masyarakatnya tercapai. Pemimpin yang baik dimata Allah ialah pemimpin yang menjalankan kewajibannya dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya berlandaskan amar makruf nahi mungkar, maksudnya untuk berbuat kebaikan dalam menyampaikan amanat dan menetapkan keadilan.

Masyarakat Kabupaten Pringsewu sebagian besar bekerja sebagai petani, dan pelaku usaha menengah kebawah. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat tentunya menjadi prioritas utama pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. *People centered development*'' adalah salah satu paradigma pembangunan yang menekankan pada pentingnya

¹² Ali Abdul Wakhid, *Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia*, (Jurnal TAPIs No.14 Vol.01 Januari–Juni 2017),h.54.

pemberdayaan (*empowerment*) manusia. Mempunyai arti bahwa manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dan kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam mengaktualisasikan segala potensinya.¹³

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan ekonomi masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan. Sehingga ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat contohnya masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat yaitu dengan diadakannya pembangunan daerah. Tujuannya untuk membantu masalah ekonomi masyarakat dan menciptakan pemerataan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing di daerah.

Dalam hal ini pemerintah ingin mengembangkan pemberdayaan ekonomi yaitu dengan mengurangi masyarakat miskin dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan daerah yang tertinggal. Dalam hal ini pemerintah pringsewu melakukan suatu upaya, salah satunya pembangunan tempat *rest area Tugu Bambu* yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Menurunnya tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan turunnya kualitas publik dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah Daerah melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya untuk memperbaiki kinerja dengan menggunakan konsep-konsep

¹³ Juliana Sonda, dkk, *Ibid*, h. 73

politik agar bisa mengatur dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Adanya reformasi birokrasi ini diharapkan dapat melakukan komunikasi organisasi yang transparan dalam mengungkapkan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin birokrasi.

Dari gambaran diatas hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kegiatan tersebut, melalui penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu”.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PEMDA Pringsewu (studi pada objek wisata *rest area* wates gading rejo kabupaten pringsewu).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik meneliti lebih jauh tentang Bagaimana tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di *rest area* Tugu Bambu Pringsewu?

2. Apa saja Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam mencapai tingkat keberhasilan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di *rest area* Tugu Bambu Pringsewu?

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menganalisis Hubungan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di *rest area* Tugu Bambu Pringsewu.
2. Mengidentifikasi Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam mencapai tingkat keberhasilan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di *rest area* Tugu Bambu Pringsewu.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi secara khusus.

- a. Memberi wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu.

- b. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan mengenai keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Moleong mengutip Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁴

2. Jenis dan Sifat Penelitian

¹⁴Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4

Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang digunakan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial di lapangan.¹⁵ Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Sifat penelitian yaitu deskriptif, dimana penulis mendeskripsi hasil penelitian yang telah didapatkan.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Fathoni, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat yang berdagang yang terlibat dalam kegiatan atau yang berada disekitar tempat pariwisata yang mempunyai usaha yang telah ditetapkan sebagai responden atau sampel. Data juga diambil dengan cara mengadakan observasi di lapangan untuk melihat kondisi nyata secara visual yang ada di

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 18

lapangan. Hal yang penting untuk mengambil data yang belum terungkap oleh alat pengumpul data yang lain.

b. Data Sekunder

Menurut Fathonoi, data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁶ Data sekunder meliputi data data penunjang dari data primer, yang didapatkan melalui perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data Sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku-buku literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang peneliti akan lakukan:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Faisal observasi sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur atau objektif terfokus pada data yang relevan dan mampu membedakan katagori dari setiap objek pengamatannya.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, h. 40

¹⁷Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian....*, h.137

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan secara langsung melihat dan mengamati *rest Area Tugu Bambu Kabupaten Pringsewu*.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Faisal wawancara adalah semacam angket yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke responden secara lisan.¹⁸

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview, perwawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Wawancara (*interview*) ditujukan kepada anggota-anggota pemerintah daerah, masyarakat yang berdagang, dan para pelanggan yang sering melintasi serta singgah di *rest area Tugu Bambu Pringsewu*. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat mengenai Tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PEMDA Pringsewu (studi pada objek wisata *rest area Wates Gading Rejo Kabupaten Pringsewu*).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga

¹⁸*Ibid*, h. 133

dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan dan tetap mempertahankan unsur terpimpin dalam wawancara mendekatkan semua maksud dan tujuan sedekat-dekatnya dengan cara efisien, yaitu wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai hasil yang tepat dan cermat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, notulen rapat, dan leger legenda.¹⁹

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan ataupun , menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa foto-foto documenter yang terkait dengan tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh PEMDA Pringsewu.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁰

Moleong mengutip Bogdan dan Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 233

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, h. 280

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menumakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Jenis penelitian kualitatif berdasarkan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Serta dengan menggunakan metode deskriptif artinya melukiskan variable semi variable, satu demi satu yang bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada atau mengidentifikasi masalah.

Model Miles dan Huberman sebagai model analisis data yang digunakan yaitu

- a. Reduksi Data merangkum, mengkategorikan memilih-milih hal yang dianggap penting dan pokok. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
 - b. Penyajian data yaitu dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori
 - c. Verifikasi adalah penarikan kesimpulan.²²
6. Keabsahan Data

Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis

²¹*Ibid*, h.248

²²Hamid Patimilia, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 100-101.

dengan bahasa yang verbal. Setelah dianalisis maka perlunya keabsahan data penelitian atau disebut dengan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori lainnya.²³

²³Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, h. 330.

BAB II

POLITIK PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Politik

1. Pengertian Politik dan Partai Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara (*city state*). Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu Aristoteles menyebut politik dengan *zoon politikon* yang kemudian terus berkembang menjadi *polites* (warga negara), *politeia* (hal-hal yang berhubungan dengan negara), *politika* (pemerintahan negara), lalu terakhir menjadi *politikos* (kewarganegaraan).¹

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara.² Sedangkan secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.³

¹ Tappil Rambe dkk., *Sejarah Politik dan Kekuasaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 2.

² Ellya Rosana, "Partai Politik Dan Pembangunan Politik", *Jurnal TAPIs*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2012), h. 138.

³ Tappil Rambe dkk., *Sejarah Politik dan Kekuasaan....*, h. 2.

Makna istilah politik menurut Prof.Dr.H.M. Amin Rais adalah hal-hal yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan serta cara dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara.⁴

Menurut Asad politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.⁵ Miriam Budiardjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.⁶

2. Peran Politik dalam Mensejahterakan Masyarakat

Mensejahterakan masyarakat bagian dari keadilan sosial yang telah tertera pada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara lahir dari pemikiran founding fathers yang rumusannya bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa. Namun, dilihat dari kenyataannya, bangsa Indonesia belum bisa meraih cita-cita ini terutama di bagian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila ke-lima. Keadilan sosial memiliki unsur untuk dikembangkan kepada citacita luhur yang memiliki maksud bahwa semua orang sama dihadapan hukum.⁷

⁴ Burhanuddin Yusuf, "Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)", *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. 4, No. 1, (2018), h. 117.

⁵ Abdullah Zawawi, "Politik dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol 5, No 1, (Maret 2015), h. 88.

⁶ Tappil Rambe dkk., *Sejarah Politik dan Kekuasaan*,h. 2.

⁷ Nila Aulia Khairunnisa, "Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa", *Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, (2018), h. 17.

Himyari Yusuf mengemukakan peran politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Alasannya politik sebagai strategi untuk mencapai tujuan bersama manusia yaitu suatu kehidupan yang adil, sejahtera, tentram yang memiliki moralitas serta spiritualitas.⁸ Kewibawaan penguasa dalam berpolitik berperan dalam mengayomi masyarakat agar merasa tenang, tenteram dan sejahtera.⁹

Arropi Hikmah, M. Fadhil Nurdin dan Risna Resnawaty memaparkan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan peran pemerintah daerah. Salah satunya sejahtera secara pendapatan ekonomi.¹⁰ Maka kesejahteraan masyarakat suatu daerah berada di kinerja Pemerintah Daerah, yang telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah.¹¹

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Undang Undang RI No. 23 tahun 2014 perubahan ketiga atas Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan dalam pasal 1 (ayat 2 dan 5) yang berbunyi Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem

⁸ Himyari Yusuf, "Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global", *Jurnal TAPIS*, Vol.8, No.2, (Juli-Desember 2012), h. 102.

⁹ Bertolomes Bolong, "Etika Politik Ulama", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, no. 1, (Agustus 2018), h. 140.

¹⁰ Arropi Hikmah, M. Fadhil Nurdin dan Risna Resnawaty, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility Pt. Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek" *Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 2, (2018), h. 1.

¹¹ Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 231.

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat 5 yang berbunyi Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.¹²

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Adapun fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut H. Nurul Aini, yaitu:¹³

- a. Fungsi Pengaturan, dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

¹² Taufik, "Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Mandar", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, (Januari 2013), h. 63.

¹³ Dina Damayanti, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal", *Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol.2, No.2, (Januari 2016), h. 4.

- b. Fungsi Pelayanan, perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai kesetaraan.
- c. Fungsi Pemberdayaan, untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah saat ini berada pada daerah perencanaan, karena perekonomian masyarakat suatu daerah tanggung jawabnya. Adanya otonomi daerah memberikan sifat sentralistik menjadi desantrilisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang penuh dalam mengatur daerahnya dalam berbagai aspek ekonomi, politik dan sosial.¹⁴ Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah umumnya menganggap bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang ada saat ini melalui UU No. 32 tahun 2004 merupakan sebuah kebijakan yang sangat baik terutama bagi ekonomi daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerahnya.¹⁵

Otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak, kewenangan dan kewajiban sebuah daerah yang mendapatkan otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menyangkut pemerintahan, ekonomi dan kepentingan masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan OTDA yang berlaku, sedangkan otonomi adalah pola pemerintahan sendiri.¹⁶

Maka Sakinah Nadir memaparkan perubahan sifat Pemerintah Daerah sebagai keuntungan, dalam sudut politik memiliki wewenang

¹⁴ Karlina Batik, Agus Suman dan Asfi Manzilati, "Implementasi Progam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Progam Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) (Studi Kasus di Dua Desa Tertinggal di Kalimantan Tengah)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2013), h. 93.

¹⁵ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desantrilisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Portetik*, Vol. 1, No. 1, (2013), h. 45.

¹⁶ Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan Ekonomi*, h. 231.

lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sedangkan dalam sudut ekonomi Pemerintah Daerah mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah kekuasaannya.¹⁷ Jadi perekonomian suatu daerah bagian dari hal penting di masyarakat, maka Pemerintah Daerah memiliki peran mensejahterakan perekonomian masyarakat daerah tetap makmur.

4. Pembangunan Ekonomi

Dedy Pudja Wardana memaparkan pemerintah memiliki pengaruh dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya kemandirian ekonomi masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi dapat menunjang pemenuhan hak dan kebebasan, serta mempromosikan simbiosis antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, antara ekonomi yang maju dan politik yang sehat, serta antara kesejahteraan masyarakat dan individu.¹⁸ Kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat apabila Pemerintah Daerah meningkatkan pendapatnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, aman, dan perlindungan di daerah yang dikuasai.¹⁹ Bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah.²⁰

¹⁷ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desantralisasi", h. 57.

¹⁸ Dedy Pudja Wardana, "Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur", *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol. 12, No. 2, (2016), h. 179.

¹⁹ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, (2018), h. 8.

²⁰ Ainul Fadilah Rachmawati, Mochammad Saleh Soeaidy, Romula Adiono, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 7, h. 1256.

Menurut Mochtar Mas'oeed bahwa kekuasaan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan program-program yang telah dikampanyekan yaitu menggerakkan pembangunan ekonomi.²¹ Pembangunan ekonomi daerah menurut Sumodingrat terdapat tiga jalur yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, dan memberikan perlindungan.²² Menurut Munir dan Fitanto bahwa Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi mandiri melalui memanfaatkan potensi alam dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat.²³

R. Didi Djadjuli memaparkan upaya Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi mandiri melalui memanfaatkan sumber daya alam.²⁴ Seperti wisata lokal, Hary Herawan menyatakan wisata lokal berhubungan dengan kearifan lokal sesuai dengan potensi alam yang ada, adat-istiadat, dan budaya yang dapat dikelola, dikembangkan dan maju bersama masyarakat dalam mencapai daya tarik wisata lokal tersebut.²⁵

Keterlaksanaan pembangunan ekonomi mandiri sesuai dengan kemampuan atau keterampilan masyarakat daerah sekitar,²⁶ dengan cara mengeluarkan program-program yang memberikan peluang kerja masyarakat

²¹ Mochtar Mas'oeed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 23.

²² Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4, h. 10.

²³ Ainul Fadilah Rachmawati, Mochammad Saleh Soeaidy, Romula Adiono, h. 269.

²⁴ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam", h. 8.

²⁵ Hary Herawan. "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3, No. 2, (September 2016), h. 106-107.

²⁶ Lasiman Sugiri, "Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat", h. 22.

daerah tersebut.²⁷ Progam tersebut berdasarkan skala usaha yaitu perdagangan, industri rumah tangga dan jasa, pertanian dan peternakan. Produk yang dihasilkan yaitu makanan dan minuman, kerajinan manik-manik, beras, sayuran, daging dan jasa pertukangan.²⁸

Pemerintah kabupaten perlu memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan atau pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis.²⁹ Pembangunan ekonomi masyarakat akan berjalan maksimal apabila Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk masyarakat.³⁰

Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi kerakyatan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang hampir disebagian besar daerah di Indonesia. Tidak terkecuali, kemungkinan Koperasi juga ada dan banyak beroperasi di daerah-daerah dan atau di wilayah.³¹ Tidak berkembangnya koperasi di masyarakat karena tidak ada kerjasama antar Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk maju bersama dalam pembangunan ekonomi mandiri.³²

²⁷ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam", h. 8.

²⁸ Indah Martati dan Suminto Andi Syarifuddin, "Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir ", *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 2, (September 2013), h. 130.

²⁹ Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah dan Muhajirah Hasanuddin, "Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang", *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, (April 2017), Vol. 3, No. 1, h. 3.

³⁰ Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin dan Erlan Suwarlan, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 3, (Agustus 2019), h. 268.

³¹ Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala, "Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban", *Asketik*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2017), h. 46.

³² Dina Damayanti, "Peran Pemerintah Daerah", h. 4.

Mzwaeity Intan Suryadi memaparkan adanya kebijakan otonomi daerah maka pemerintah daerah berbondong-bondong membangun ekonomi melalui sektor pariwisata, maka perlunya promosi ke masyarakat luas agar mengetahui informasi.³³ Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini diharapkan mampu mendukung upaya dalam mempromosikan dan memudahkan serta mempercepat mengakses informasi objek wisata yang ada, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung.³⁴

Pemerintah Daerah berperan memberi penyuluhan dan pemberian informasi mengenai bagaimana mengelola usaha. Agar pengusaha mikro terstimulus untuk menghasilkan produk yang tepat jumlah dan tepat. Maka Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi sarana atau peralatan dan modal yang memadai.

Aspek pembangunan ekonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat di daerah yang semakin baik, pemerataan wilayah daerah, pemberdayaan masyarakat daerah, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi daerah mereka.³⁵

³³ Meity Intan Suryadi, "Pelaksanaan Promosi Melalui Media Sosial Pada Objek Wisata Dakwah Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Administrasi Program Studi Pariwisata*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2016), h. 2.

³⁴ Eka Afrianti, Handayani Putri Wardanny dan Ali Ibrahim, "Pengembangan Aplikasi Informasi Wisata di Kota Palembang Berplatform Android", *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, Vol. 9, No. 1, (April 2017), h. 1234.

³⁵ Tulus T.H. Tambunan, *Pembangunan*, h. 231.

Pendapat Mochtar selaras dengan peran pemerintah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, yaitu:³⁶

- a. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI.
- b. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “ halhal yang mendasar dalam undangundang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.
- c. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan

³⁶ Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2011), h. 88

kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

- d. Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan Ekonomi masyarakat sebagai berikut:
 - a) Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat.
 - b) Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.³⁷

Arti pemberdayaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 5 ayat 2 adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁸

³⁷ Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono, “Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Malang”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, h. 34.

³⁸ Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi”, *JKMP*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2016), h. 55.

Menurut Kartasasmita pemberdayaan adalah proses pembangunan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran.³⁹ Sumodingrat memaknai pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.⁴⁰ Karena pemberdayaan ditujukan kepada kemampuan orang, kelompok rentan dan lemah:⁴¹ Awal pembangunan dikenal saat pembangunan industri yang menguasai potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Sehingga pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.⁴²

Penulis menyimpulkan pengertian pemberdayaan dari para ahli yaitu suatu alat meningkatkan potensi masyarakat melalui potensi daerah tersebut dalam mensejahterakan masyarakat. Pembahasan ini, menuju pemberdayaan pada masyarakat.

Menurut Soetomo, masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.⁴³

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam

³⁹ Mukhtar dkk., "Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo)", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16, No. 1, (2011), h. 22.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 23.

⁴¹ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2011), h. 15-27.

⁴² Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin dan Erlan Suwarlan, "Pemberdayaan, h. 268.

⁴³ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 25.

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono menyimpulkan, pemberdayaan masyarakat adalah proses masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.⁴⁴ Arropi Hikmah, M. Fadhil Nurdin dan Risna Resnawaty memaparkan tugas kelembagaan pemerintah dan kelompok swadaya untuk membangun masyarakat.⁴⁵ Menurut Aziz sebagai proses pembangunan masyarakat melalui sumber daya alam untuk meningkatkan kemandirian kehidupan.⁴⁶ Pembangunan sumber daya alam menurut Chamber sebagai konsep upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.⁴⁷ Pencapaian upaya tersebut, menurut Munawwar Noor untuk kemajuan dan perubahan bangsa kedepan, dengan masyarakat memiliki kemampuan keterampilan dan kemampuan dalam menghasilkan ekonomi sendiri.⁴⁸ Sehingga pemberdayaan masyarakat menurut Toto dapat meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, untuk mengurangi kemiskinan dan ketertinggalan.⁴⁹

⁴⁴ Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, h. 24.

⁴⁵ Arropi Hikmah, M. Fadhil Nurdin dan Risna Resnawaty, "Pemberdayaan, h. 1.

⁴⁶ Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, h. 24.

⁴⁷ Munawwar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, h. 88

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Alvien Septianan Haerisma, "Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Cirebon", *artikel IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, h. 12.

Menurut Tjokowinoto keberhasilan peningkatan pemberdayaan mencakup seluruh aspek bidang ekonomi.⁵⁰

Penulis menyimpulkan pengertian pemberdayaan masyarakat berdasarkan beberapa teori dari para ahli yaitu suatu proses memandirikan masyarakat melalui sumber daya yang ada, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Menurut Cornelis dan Miar pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai agenda pembangunan nasional oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat.⁵¹ Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan cara dalam pembangunan perdesaan lebih maju, dengan meningkatkan sumber daya manusia, yaitu membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.⁵² Rizal Muttaqin memaparkan cara mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai dan mandiri, melalui pelengkapan fasilitas produksi, distribusi, pembinaan informasi

⁵⁰ Yesi Indian Ariska, Yefriza dan Yusnida, "Analisis Pengaruh Pemerintahan Pengeluaran, Infrastruktur, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Baru Kabupaten Reformasi di Bengkulu Provinsi", *JEPP*, Vol. 6 No. 2, h. 73.

⁵¹ Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)", *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, (2016), h.7-11.

⁵² Yana Sahyana, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)", *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, (Oktober 2017), h. 157.

pemasaran dan pengembangan keterampilan.⁵³ Tujuannya menurut Harapan penguatan pemberdayaan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.⁵⁴

Masita Hi. Modim, Andi Samsu Alam dan Andi Muh. Rusli memaparkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat memiliki upaya dalam menganalisis dan memetakan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga mengeluarkan kebijakan tidak secara sepihak, maka peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan melalui metode dalam mengeluarkan kebijakan.⁵⁵

Syahrul Falah dan Irham Zaki memaparkan perlunya langkah-langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai keberhasilan, yaitu:⁵⁶

- a. Menciptakan suasana atau iklim kerja yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau sesuai dengan potensi daerah.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

⁵³ Rizal Muttaqin, "Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peranan Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)", *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2011), h. 76.

⁵⁴ Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal, h.7-11

⁵⁵ Masita Hi. Modim, Andi Samsu Alam dan Andi Muh. Rusli, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2010), h. 32.

⁵⁶ Syahrul Falah dan Irham Zaki, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ala Pondok Pesantren di Kleurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 4, (April 2017), h. 340-352.

- c. Pemberian perlindungan dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus dicegah yang lemah menjadi lebih kuat.

Adapun prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:⁵⁷

- a. Profesionalisme, penanganan dilaksanakan berdasarkan kaidah profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.
- b. Keterpaduan, penanganan diselenggarakan secara sinergis baik antar unit di Departemen Agama maupun lintas sektor dan lintas pelaku antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- c. Kemandirian, penanganan kemiskinan bertujuan menciptakan kemandirian dengan menghindari ketergantungan kepadapihak luar

Adapun kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:⁵⁸

- a. Pengembangan kapasitas, diarahkan untuk menggali dan meningkatkan potensi dan sumber untuk didayagunakan sebagai modal sosial menuju kemandirian.
- b. Pendampingan sosial, diarahkan untuk membangun motivasi, menumbuhkan kepercayaan diri, serta meningkatkan berbagai keahlian oleh para pendamping terlatih.
- c. Penumbuhan kepedulian sosial masyarakat, diarahkan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, termasuk dunia usaha agar dapat mengambil bagian yang signifikan dalam proses penanganan kemiskinan.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

d. Penguatan jaringan penanganan, diarahkan untuk memperkuat jaringan-jaringan sosial penanganan yang telah ada antar sektor dan antara pelaku baik antar instansi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Maka Pemerintah Daerah telah meminimalisir pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa.⁵⁹

D. Upaya Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.⁶⁰

UKM (Usaha Kecil Menengah) perlu peran Pemerintah Daerah dalam memberi pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pelatihan, permodalan atau pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis.⁶¹

⁵⁹ Taranggana Ganti Putra, "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang", *Kebijakan Manajemen Publik*, Vol. 3, No. 1, (Januari-April 2015), h. 1.

⁶⁰ Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin dan Binahayati Rusyidi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pnpm Mandiri", *Prosiding*, Vol. 2, No. 3, h. 351.

⁶¹ Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah dan Muhajirah Hasanuddin, "Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang", *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, (April 2017), Vol. 3, No. 1, h. 3.

Penyediaan fasilitas sebagai daya tarik *rest area* Tugu Bambu sebagai wisata lokal, selaras dengan Hary Herawan bahwa wisata lokal berhubungan dengan kearifan lokal sesuai dengan potensi alam yang ada, adat-istiadat, dan budaya yang dapat dikelola, dikembangkan dan maju bersama masyarakat dalam mencapai daya tarik wisata lokal tersebut.⁶²

Selaras dengan Wanda Fazriah Oktaviani dan Anna Fatchiya memaparkan konsep dari desata wisata menawarkan alam yang masih asri, bersih, aneka makanan dan minuman yang menjadi ciri khas, tradisi budaya, pesona alam pertanian yang masih tradisional.⁶³

Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini diharapkan mampu mendukung upaya dalam mempromosikan dan memudahkan serta mempercepat mengakses informasi objek wisata yang ada, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung.⁶⁴

Maka perlunya upaya melalui cara pelatihan promosi pada komponen-komponen yang mendukung pengunjung semakin banyak. Kementerian pariwisata memaparkan perlunya memberikan pelatihan

⁶² Hary Herawan. "Dampak Pengembangan", h. 106-107.

⁶³ Wanda Fazriah Oktaviani dan Anna Fatchiya, "Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Promosi Wisata Umbul Ponggok, Kabupaten Klaten", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, (Februari 2019), h. 14.

⁶⁴ Eka Afrianti, Handayani Putri Wardanny dan Ali Ibrahim, "Pengembangan Aplikasi Informasi Wisata di Kota Palembang Berplatform Android", *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, Vol. 9, No. 1, (April 2017), h. 1234.

promosi pariwisata melalui media masa, melalui beberapa strategi yaitu:⁶⁵

- a. Menciptakan konten dan memilih konten. Konten melalui promosi di instagam fokus pada foto-foto dan video, maka perlunya pelatihan dalam memfoto potensi alam pariwisata dan hal-hal yang menarik seperti aneka ragam makanan, minuman, kerajinan tangan, rumah adat dan lain-lain yang berhubungan dengan ciri khas daerah wisata lokal tersebut. Kemudian memilih konten yang baik dan menarik, setelah menemukan maka perlu latihan cara mengedit foto dan video.
- b. Mempromosikan konten melalui platform yang mendukung. Setelah di edit foto dan video terasa menarik masyarakat untuk berkunjung maka dapat dibagikan di website, instagam, facebook, twitter, whatsapp dan google+ sebagai cara promosi.
- c. Monitoring aktivitas yang telah dilakukan. Pemantuan setelah mempromosikan melihat respon ketertarikan, bisa melalui komentar ataupun like.
- d. Melakukan evaluasi. Evaluasi mencari kekurangan untuk kebaikan apa yang telah diusahakan.

Konten yang telah dibuat oleh pedagang, mengolah wahana, dan lain sebagainya maka Pemerintah Daerah dapat membantu mempromosikan melalui menggunakan aplikasin yang telah dikembangkan Herlina dkk., yaitu Aplikasi E-Tourism berbasis android

⁶⁵ Gita Atiko dkk., "Analisis Strategi Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial Oleh Kementerian Pariwisata Ri (Studi Deskriptif Pada Akun Instagram @Indtravel)", *Jurnal Sositologi*, Vol. 15, No 3, (Desember 2016), h. 238.

sebagai strategi promosi pariwisata Provinsi Lampung bertujuan untuk mengenalkan objek wisata dan menarik pengunjung objek wisata.⁶⁶ Adapun melalui Eka Afrianti, Handayani Putri Wardanny dan Ali Ibrahim mengembangkan Aplikasi Informasi Wisata di Kota Palembang Berplatform Android.⁶⁷

Keefektifan promosi melalui instagam memberikan peningkatan minat beli dan pengunjung pariwisata, contohnya para usaha pariwisata dapat mengumpulkan konten promosi kepada pemegang akun intragam pariwisata tersebut untuk dipromosikan ataupun setiap usaha di pariwisata dapat mempromosikan sendiri usahanya di berbagai bidang.⁶⁸ Sesuai dengan penelitian Wenday Dwi Novi Kurniawati telah berhasil memanfaatkan instagam oleh komunitas wisata gobrokan dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah.⁶⁹ Menurut Yana Syahyanan pembangunan desa lebih maju dengan mengubah perilaku masyarakat.⁷⁰

⁶⁶ Herlina dkk., “Pengembangan Aplikasi E-Tourism Berbasis Android Sebagai Strategi Promosi Pariwisata Provinsi Lampung”, *Konferensi Nasional Sistem dan Informatika*, (2015), h. 78.

⁶⁷ Eka Afrianti, Handayani Putri Wardanny dan Ali Ibrahim, Pengembangan, h. 1234.

⁶⁸ Deru R. Indika dan Cindy Jovita, “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2017), h. 26.

⁶⁹ Wanda Fazriah Oktaviani dan Anna Fatchiya, “Efektivitas, h. 14.

⁷⁰ Yana Sahyana, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)”, *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, (Oktober 2017), h. 157.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pustaka Cideseno, 1996.
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja, Rosdakarya, (2014), h. 4
- Mochtar Mas'ood, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Patimilia, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Pipit D, Septiani, *Pertumbuhan Ekonomi, dan Kestabilan Politik di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.
- Sanapia, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta,: Rajawali Pers, 2010.
- Skousen, M, *Teori-teori ekonomi modern*, Prenadamedia,: Jakarta, 2005.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Tambunan, Tulus T.H, *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Sumber Jurnal:

- Aridhayandi, M. Rendi “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, Oktober-Desember 2018.
- Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi”, *JKMP*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016.
- Arropi Hikmah, M. Fadhil Nurdin dan Risna Resnawaty, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility Pt. Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek” *Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 2, 2018.
- Bolong, Bertolomes “Etika Politik Ulama”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 1, Agustus 2018.

- Damayanti, Dina “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal”, *Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol. 2, No. 2, Januari 2016.
- Dedy Pudja Wardana, “Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur”, *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol. 12, No. 2, 2016.
- Deru R. Indika dan Cindy Jovita, “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin dan Binahayati Rusyidi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pnpm Mandiri”, *Prosiding*, Vol. 2, No. 3.
- Djadjuli, R. Didi “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4.
- Eka Afrianti, Handayani Putri Wardanny dan Ali Ibrahim, “Pengembangan Aplikasi Informasi Wisata di Kota Palembang Berplatform Android”, *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, Vol. 9, No. 1, April 2017.
- Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono, “Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Malang”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4.
- Fadilah Rachmawati, Ainul Mochammad Saleh Soeaidy, Romula Adiono , “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 7.
- Gita Atiko dkk., “Analisis Strategi Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial Oleh Kementerian Pariwisata RI (Studi Deskriptif Pada Akun Instagram @Indtravel)”, *Jurnal Sositologi*, Vol. 15, No 3, Desember 2016.
- Haerisma, Alvien Septianan “Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Cirebon”, *artikel IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.

- Herlina dkk., “Pengembangan Aplikasi E-Tourism Berbasis Android Sebagai Strategi Promosi Pariwisata Provinsi Lampung”, *Konferensi Nasional Sistem dan Informatika*, 2015.
- Herawan, Hary “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal”, *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3, No. 2, September 2016.
- Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin dan Erlan Suwarlan, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Moderat*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2019.
- Indah Martati dan Suminto Andi Syarifuddin, “Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir “, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 2, September 2013.
- Karlina Batik, Agus Suman dan Asfi Manzilati, “Implementasi Progam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Progam Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) (Studi Kasus di Dua Desa Tertinggal di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.
- Khairunnisa, Nila Aulia “Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa”, *Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Masita Hi. Modim, Andi Samsu Alam dan Andi Muh. Rusli, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat)”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, Januari 2010.
- Mukhtar dkk., “Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16, No. 1, 2011.
- Muttaqin, Rizal “Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peranan Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya) “, *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2011.

- Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala, “Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban”, *Asketik*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017.
- Nirwana, Devi Chandra Muhammadiyah dan Muhajirah Hasanuddin, “Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang”, *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, April 2017.
- Noor, Munawar “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, Juli 2011.
- Putra, Taranggana Ganti “Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang”, *Kebijakan Manajemen Publik* , Vol. 3, No. 1, Januari-April 2015.
- Qohar, Abd *Politik dan Islam di Indonesia*, (Jurnal TAPIS Vol. 14 No.01 Januari–Juni 2017),h.46.
- Rosana, Ellya *Partai Politik Dan Pembangunan Politik*, (Jurnal TAPIS, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2012),h.140.
- Sahyana, Yana “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)”, *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2017.
- Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desantralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Portetik*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Suryadi, Meity Intan “Pelaksanaan Promosi Melalui Media Sosial Pada Objek Wisata Dakwah Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Administrasi Program Studi Pariwisata*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- Syahrul Falah dan Irham Zaki, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ala Pondok Pesnatren di Kleurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 4, April 2017.
- Taufik, “Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Mandar”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, Januari 2013.

- Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”, *Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, 2016.
- Wakhid, Ali Abdul *Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia*, (Jurnal TAPIs No.14 Vol.01 Januari–Juni 2017),h.54
- Wanda Fazriah Oktaviani dan Anna Fatchiya, “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Promosi Wisata Umbul Ponggok, Kabupaten Klaten”, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, Februari 2019.
- Wenday Dwi Novi Kurniawati, “Pemanfaatan Instagram Oleh Komunitas Wisata Grobogan Dalam Mempromosikan Potensi Pariwisata Daerah”, *Komuniti*, Vol. 7, No. 2, September 2016.
- Widjajanti, Kesi “Model Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2011.
- Yesi Indian Ariska, Yefriza dan Yusnida, “Analisis Pengaruh Pemerintahan Pengeluaran, Infrastruktur, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Baru Kabupaten Reformasi di Bengkulu Provinsi”, *JEPP*, Vol. 6 No. 2.
- Yusuf, Burhanuddin “Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)“, *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Yusuf, Himyari *Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global* , (Jurnal TAPIs, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2012),h.101.
- Zawawi, Abdullah *Politik dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Ummul Qura, Vol 5, No 1, Maret 2015).

Sumber Wawancara :

- Agustina Pudji Rahayu, observasi di *Rest area* Tugu Bambu Gading Rejo, Lampung, 13 Februari 2020.